

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 1, Nomor 6, Juli 2023****E-ISSN: 2986-6340****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8152238>**

Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough Dalam Berita Korupsi: Pungli di Sekolah

Fajriani¹¹Universitas Madako Tolitoli, Sulawesi Tengah, IndonesiaEmail: fajrianiirazak50@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini merupakan analisis wacana kritis yang melihat bahasa dalam teks untuk dianalisis. Bahasa dianalisis tidak hanya menggambarkan aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Oleh karena itu, dalam menganalisis teks berita kasus korupsi yang berkaitan dengan pungli di sekolah akan dikaitkan dengan aspek-aspek yang terdapat di luar teks seperti yang memproduksi teks, masyarakat pembaca, dan konteks sosial yang memengaruhi produksi teks. Teori analisis wacana kritis yang digunakan dalam menganalisis teks berita pungli di sekolah ini adalah Norman Fairclough yang menitikberatkan pada bahasa sebagai praktik kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimanakah analisis wacana kritis model Norman Fairclough dalam berita korupsi: pungli di sekolah?. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan analisis wacana kritis model Norman Fairclough dalam berita korupsi: pungli di sekolah. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa berdasarkan AWK model Norman Fairclough, dapat disimpulkan bahwa dalam berita korupsi tentang pungli di sekolah, terdiri atas tiga dimensi, yaitu: 1) dimensi linguistik teks, yang menampilkan beberapa aspek linguistik sebagai konsep dalam menjelaskan sebuah konteks, yaitu: a) penggunaan akronim, b) penggunaan idiom, dan c) penggunaan lawan kata; 2) dimensi penafsiran praktik wacana, yang mengungkapkan bahwa dalam memproduksi teks berita tentang pungli di sekolah, media rata-rata menggunakan strategi wacana nominasi dengan penyebutan aktor sosial, melalui prinsip kejelasan, kebenaran dan kesesuaian; 3) dimensi penjelasan sosio kultural.

Kata kunci: *Norman Fairclough, Pungli, Berita, Sekolah*

PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu permasalahan sosial yang sangat akrab dalam masyarakat Indonesia. Hal ini karena hampir setiap hari menjadi berita utama dalam media Indonesia dan selalu menimbulkan perdebatan dan diskusi yang cukup panas. Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa korupsi itu sudah menjadi budaya Indonesia. Bahkan bisa dikatakan telah mendarah daging dalam pemerintahan Indonesia. Puncaknya adalah pada masa rezim soeharto. Ciri utama budaya korupsi ini adalah pemanfaatan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Keuntungan itu diukur dengan nilai nominal atau uang yang berdampak pada perusakan akhlak dan moral bangsa.

Semakin merajalelanya korupsi ini terlihat di berbagai ranah kehidupan bangsa Indonesia, yaitu mulai dari ranah politik, hukum, kesehatan, agama, sampai pada dunia pendidikan. Yang cukup mencoreng dunia pendidikan akhir-akhir ini adalah maraknya pungli di sekolah-sekolah dengan berbagai modus. Berita tentang pungli ini pun marak menghiiasi media di Indonesia. Bahkan dua tahun terakhir ini berita tentang pungli juga ramai menghiiasi media lokal dan media online. Hal ini terkait dengan pungli yang dilakukan oleh beberapa kepala sekolah di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, media dimanfaatkan sebagai gerakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Sekaitan dengan hal di atas, Prayogi dan Rusminto (2016) mengatakan bahwa era digitalisasi dan keterbukaan informasi seperti saat ini, menuntut masyarakat untuk semakin

jeli dalam memilih berita agar tidak mudah terprovokasi, tidak mengikuti agenda setting media serta masih dapat mempertahankan "netralitasnya" sebagai pembaca. Untuk itu, pembaca harus mencoba menelisik lebih jauh "bagaimana" dan "mengapa" berita-berita itu dihadirkan. Dengan langkah atau cara yang demikian, akan membawa kita untuk memahami tentang hegemoni (ideologi dan kekuasaan) yang tersembunyi dibalik teks-teks berita itu. Untuk memahami itu, tentu saja dapat dilihat dari piranti bahasa yang digunakan dalam teks.

Dengan teks sebagai kajian, tulisan ini merupakan analisis wacana kritis yang melihat bahasa dalam teks untuk dianalisis. Bahasa dianalisis tidak hanya menggambarkan aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Oleh karena itu, dalam menganalisis teks berita kasus korupsi yang berkaitan dengan pungli di sekolah akan dikaitkan dengan aspek-aspek yang terdapat di luar teks seperti yang memproduksi teks, masyarakat pembaca, dan konteks sosial yang memengaruhi produksi teks.

Teori analisis wacana kritis yang digunakan dalam menganalisis teks berita pungli di sekolah ini adalah Norman Fairclough yang menitikberatkan pada bahasa sebagai praktik kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimanakah analisis wacana kritis model Norman Fairclough dalam berita korupsi: pungli di sekolah?. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan analisis wacana kritis model Norman Fairclough dalam berita korupsi: pungli di sekolah.

METODE

Analisis wacana kritis adalah analisis bahasa yang dalam penggunaannya menggunakan paradigma bahasa kritis (Darma, 2014:99). Lebih lanjut Darma mengatakan bahwa analisis wacana kritis (AWK) memang menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis, tetapi hasilnya bukan untuk memperoleh gambaran dan aspek kebahasaan, melainkan menghubungkannya dengan konteks. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Van Dijk (dalam Djatmika, 2014:2-3) bahwa wacana itu tidak hanya menyangkut penggunaan bahasa, tetapi lebih dari itu yang melibatkan beberapa komponen penting yang lain dari konsep wacana, di antaranya dengan melibatkan siapa yang menggunakan bahasa, bagaimana menggunakannya, mengapa menggunakannya, dan kapan menggunakannya. Sementara Firth (dalam Syamsuddin, 1992:2) mengemukakan bahwa wacana adalah *language was only meaningful in its context of situation*. Artinya, pembahasan wacana adalah pembahasan bahasa dan tuturan yang harus dalam satu rangkaian kesatuan situasi atau dengan kata lain, makna suatu bahasa berada dalam rangkaian konteks dan situasi.

Dalam AWK ini, ada banyak teori dari para ahli yang dapat diterapkan untuk menganalisis sebuah wacana. Salah satunya adalah Norman Fairclough. Menurut Norman Fairclough (dalam Rasyid, 2009:264) wacana merupakan penggunaan bahasa yang dipahami sebagai praktik sosial yang menggambarkan hubungan dialektis di antara peristiwa tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Penggunaan label kritis dalam kajian ini mempunyai makna tersendiri dengan tujuan untuk menunjukkan hubungan yang mungkin disembunyikan dari orang-orang seperti hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideology yang mengacu pada wacana yang dikaji.

Fairclough (dalam Vinsensius, 4 Desember 2007) melihat bagaimana penempatan dan fungsi bahasa dalam hubungan sosial khususnya dalam kekuatan dominan dan ideologi. Fairclough berupaya menteorisasikan konsep wacana dengan menggabungkan beberapa tradisi, yakni linguistik, tradisi interpretative, dan sosiologi. Dengan demikian, Fairclough menandakan tiga dimensi pada setiap peristiwa diskursif, yaitu: teks, praktik diskursif, dan praktik sosial (Titscher, dkk, 2009:244—245). Masing-masing dimensi ini memiliki wilayah dan proses masing-masing dan ketiganya berhubungan secara dialektis. Dimensi pertama adalah teks yang merupakan hasil dari proses produksi.

Teks yang dimaksud dalam hal ini adalah teks-teks bahasa (lisan dan tulisan). Yang kedua adalah praktik diskursif yang terkait dengan interaksi interaksi teks dengan individu atau masyarakat dalam bentuk proses produksi dan interpretasi. Dimensi ketiga adalah praktik sosial atau konteks yang mencakup praktik-praktik sosio-kultural di mana proses produksi dan interpretasi itu berlangsung. Ketiga dimensi itu kemudian dianalisis dengan tiga model analisis yang berbeda, yaitu: 1) deskripsi, digunakan untuk menganalisis teks; 2) interpretasi, digunakan untuk menganalisis proses produksi dan interpretasi teks; dan 3) eksplanasi, digunakan untuk menganalisis praktik-praktik sosio-kultural yang mencakup level situasional, institusional, dan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek-Aspek Linguistik Teks

Produksi teks tidak terlepas dari aspek linguistik. Aspek linguistik ini yang menjelaskan tentang hegemoni dalam suatu teks berita. Hal yang sama juga terjadi dalam berita “pungli di sekolah” yang cukup mencoreng dunia pendidikan kita saat ini. Aspek-aspek linguistik dalam teks berita “pungli di sekolah” dapat diuraikan sebagai berikut.

Penggunaan Akronim

Dalam menyampaikan berita tentang korupsi yang berkaitan dengan pungutan liar yang terjadi di sekolah-sekolah, penulis berita pada umumnya lebih cenderung menggunakan bentuk akronim, yaitu kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Penulis berita baik dari media cetak, elektronik, maupun media online lebih cenderung menggunakan akronim. Hal ini tampaknya berkaitan dengan rasa. Kata *pungli* dan *tipikor* dianggap lebih halus (eufemisme) untuk menggantikan ungkapan yang dirasakan lebih kasar dan menohok pelaku pungli. Akronim *pungli* dibentuk dari frase nomina *pungutan liar* dan *tipikor* juga dibentuk dari frase nomina yaitu *tindak pidana korupsi*. Penulisan frase *pungutan liar* dan *tindak pidana korupsi* dianggap sebagai ungkapan yang cukup kasar dibandingkan dengan kata *pungli* dan *tipikor*. Hal ini terlihat dari berbagai judul berita *pungli* dari berbagai media.

Wali Kota Makassar: Saya tidak main-main jika ada pungli di sekolah (Merdeka.com/23 Oktober 2016)

Polisi Periksa 2 Kepala Sekolah di Makassar terkait pungli (Kompas.com/14 November 2016)

Dewan Makassar Sebut Oknum Guru SMAN 5 Pungli Jadikan Siswa “Sapi Perah” (Makassar, Berita-Sulsel.com/21 November 2016)

BREAKING NEWS: Ada Pungli di Sekolah, Kepala SMAN 5 Makassar Ditahan di Lapas Kelas 1 Makassar (Tribun-Timur.com/24 Februari 2017)

Diduga Pungli, Kepala SMAN 21 Makassar Dilaporkan ke Kejari (www.berita – satu.com/6 Maret 2017)

Dukung Pemberantasan Pungli (Kompas, 13 September 2017)

Terkait dengan penggunaan akronim tipikor, dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Di hadapan majelis hakim pengadilan Tipikor Makassar, Bonar Hariandja dan dua hakim lainnya menyebut tidak pernah mendapatkan permohonan dari terdakwa seputar penambahan kelas di SMAN 5.” (Tribun-Timur.com/19 Juni 2017)

Akrone *pungli* merujuk pada kata *memungli*, yaitu perbuatan dengan meminta sesuatu (uang dan sebagainya) kepada seseorang (lembaga, perusahaan, dan sebagainya) tanpa menurut peraturan yang lazim, sedangkan *tipikor* adalah tindak pidana korupsi yaitu perbuatan kejahatan yang berupa korupsi yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. *Pungli* adalah penyalahgunaan wewenang, tujuannya untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari si pembayar pungutan. Kasus *pungli* melibatkan dua pihak yaitu pengguna jasa dan oknum petugas. Oleh

karena itu, pungli pada umumnya terjadi di lapangan dan berlangsung secara singkat dengan imbalan langsung (biasanya berupa uang).

Akronim *pungli* dan *tipikor* menjelaskan bagaimana korupsi terjadi dalam dunia pendidikan melalui pungli yang dilakukan oleh kepala-kepala sekolah dan oknum lainnya yang terlibat. Para kepala sekolah memanfaatkan wewenang dan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan dengan berbagai modus, seperti penerimaan siswa baru, penambahan kelas, bantuan fasilitas sekolah, sumbangan sukarela, dan sebagainya.

Pungutan liar yang terjadi di sekolah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai yang dianut dan berkembang dalam masyarakat, terutama Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Perpres No.87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI). Kasus ini kemudian melahirkan hegemoni (ideologi dan kekuasaan). Ideologi pemberantasan korupsi yang selama ini terabaikan dan bahkan terkesan pembiaran. pembiaran itu dilakukan karena juga memberikan keuntungan bagi pihak lain yang tidak terlibat tetapi secara tidak langsung memiliki kekuasaan penuh atau kekuasaan yang lebih tinggi dari pelaku yang dalam hal ini adalah pejabat lingkungan pemerintahan. Keuntungan itu seperti mendapatkan jatah calon siswa. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh LBH Makassar pada kutipan berikut.

“Sementara keterlibatan pejabat di lingkungan pemerintahan, modusnya biasa membiarkan praktik tersebut, karena memiliki kepentingan meminta jatah calon siswa tertentu untuk diluluskan di sekolah tersebut,” (Tribun-Timur.com/5 Maret 2017)

Kasus pungli di sekolah khususnya dalam proses penerimaan siswa baru diakui sudah berlangsung sejak lama, bahkan telah menjadi pengetahuan umum masyarakat, terutama di sekolah favorit. Modus praktik pungli ini diketahui tidak hanya melibatkan kepala sekolah, tetapi sudah terorganisir yang melibatkan beberapa oknum seperti guru, pejabat pemerintah, dan makelar. Hal ini terdapat dalam kutipan berikut.

“Modus praktik pungli diketahui tidak hanya melibatkan kepala sekolah, tetapi telah menjadi sindikat yang bekerja setiap tahun karena ada juga yang berperan sebagai makelarnya, termasuk guru.” (Tribun-Timur.com/5 Maret 2017)

Kasus *pungli* di sekolah yang merupakan wujud dari *tipikor* secara tidak langsung melahirkan ideologi masyarakat tentang pemberantasan korupsi dalam dunia pendidikan yang mulai dibangun karena sudah cukup mencoreng nama baik pendidikan, khususnya di Makassar. Oleh karena itu, kasus pungli di sekolah-sekolah dengan berbagai modus itu harus diberantas hingga bersih. Jika tidak mengambil tindakan yang serius, praktik pungli ini akan tetap berlangsung.

Penggunaan Idiom

Dalam teks berita tentang pungli di sekolah juga terdapat penggunaan idiom, yaitu konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna unsurnya. Idiom yang digunakan itu adalah *sapi perah* dan *lewat jendela*. Penggunaan idiom ini terdapat dalam berita: 1) Dewan Makassar sebut Oknum Guru SMAN 5 Pungli Jadikan Siswa “Sapi Perah”; 2) Polisi Periksa 2 Kepala Sekolah di Makassar Terkait Pungli; 3) Pemkot Makassar melalui Humas Gelar Diskusi Cegah Pungli di Sekolah. Penggunaan idiom *sapi perah* dan *lewat jendela* dapat dilihat pada kutipan berita berikut ini.

“Ini tidak sehat untuk dunia pendidikan kita yang selalu jadi **sapi perah** (oknum pungli),” tegas politisi Partai Nasdem ini. (Berita-Sulsel.com/21 November 2016)

“Kedua Kepsek itu dilapor LSM terkait pungli penerimaan siswa baru. Yang biasa ada disebut **‘lewat jendela’** masuk sekolah, itulah yang dilaporkan oleh LSM ke Polda Sulsel. Dari Polda Sulsel, perkara tersebut dilimpahkan ke Polrestabes Makassar untuk ditindaklanjuti,” ungkap Musbagh Niam. (Kompas.com/14 November 2016)

“Menurutnya, ada beberapa sekolah tingkat atas pada penerimaan murid baru tahun lalu mengambil jalan pintas dengan menambah ruang kelas untuk menerima murid baru melalui jalur “**lewat jendela**” sehingga berdampak psikologis pada anak itu sendiri.” (Celebes-news.com/17 Maret 2017)

Idiom *sapi perah* dalam teks *berita-sulsel.com* dapat kita maknai ‘mengambil keuntungan’. Artinya, pelaku pungli yang dalam hal ini adalah kepala sekolah dan guru selalu mengambil keuntungan dari siswa melalui berbagai modus, seperti: les tambahan, penjualan buku, perbaikan fasilitas sekolah atau ruang belajar, dan sebagainya. Cara-cara seperti itu tentu saja membuat citra dan nama baik pendidikan terutama sekolah itu sendiri menjadi tercoreng. Hal ini tentu saja mencerminkan bagaimana bobroknya akhlak seorang pendidik yang seharusnya mengajarkan hal-hal atau perilaku yang baik kepada anak didiknya justru memberikan contoh perilaku yang tidak pantas. Korban pungli yang dalam hal ini adalah siswa tentu saja juga merasa tertekan karena didorong oleh rasa takut. Jika tidak mengiyakan permintaan sekolah (kepala sekolah dan guru) akan berimbas pada nilai yang akan diperolehnya. Dengan demikian, kasus pungli di sekolah memang perlu diberantas sampai ke akar-akarnya agar citra atau nama baik dunia pendidikan membaik di mata nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu saja dibutuhkan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak yang terkait seperti Kepala Dinas Pendidikan, Kepala UPTD, Dewan Pendidikan, LSM, Pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan orang tua siswa untuk memantau segala hal yang berkaitan dengan siswa dan guru atau kepala sekolah.

Idiom *lewat jendela* dalam teks berita *kompas.com* seperti pada kutipan di atas, dapat kita maknai ‘jalan pintas’. Artinya, siswa diterima di sekolah dengan cara membayar dengan jumlah sesuai dengan kesepakatan pelaku pungli yang dalam hal ini adalah kepala sekolah dan guru.

Berbicara tentang *lewat jendela* atau *jalan pintas* ini, pada dasarnya tidak sepenuhnya merupakan keinginan pihak sekolah, tetapi juga karena ada paksaan dari orang tua siswa yang berkeinginan menyekolahkan anaknya di sekolah yang memiliki nama atau sekolah favorit. Terlebih-lebih jika orang tua siswa ini berlatar belakang sebagai orang berada atau kaya. Ia tidak berkeberatan mengeluarkan uang banyak agar anaknya bersekolah di sekolah favorit. Hal ini pun memberi kesempatan atau peluang kepada pihak sekolah terutama kepala sekolah dan guru untuk mendapatkan keuntungan. Diperparah dengan sikap pembiaran pemerintah. Oleh karena itu, dalam kasus yang demikian, perlu ada kesadaran dari pihak orang tua agar tidak memaksakan anak untuk bersekolah di sekolah favorit atau unggulan, tetapi biarkan anak memilih sekolah yang diinginkan sesuai dengan kemampuannya yang diukur melalui tes penerimaan siswa baru. Sekolah favorit atau sekolah unggulan tidak menjamin anak kita mendapat ilmu dan didikan yang baik.

Sama halnya dengan teks berita sebelumnya, penggunaan idiom *lewat jendela* pada teks berita *celebes-news.com* juga bermakna ‘jalan pintas’. Artinya, siswa terdaftar atau diterima sebagai siswa baru di salah satu sekolah dengan cara membayar. Biasanya, hal ini terjadi karena siswa tidak lulus dalam tes masuk penerimaan baru di sekolah tersebut, atau memang tidak diterima di sekolah negeri mana pun karena nilainya rendah, dan sebagainya. Pihak sekolah pun memanfaatkan keadaan ini. Pihak sekolah menerima sejumlah siswa dengan ketentuan bersedia membayar atau memberikan sumbangan sukarela untuk penambahan ruang kelas. Diperparah dengan kurangnya pemahaman sebagian orang tua yang memaksakan kehendak untuk menyekolahkan anaknya di sekolah favorit. Padahal, sejumlah sekolah swasta juga banyak yang memiliki prestasi yang menonjol baik di tingkat nasional maupun di luar negeri.

Kasus seperti di atas, disadari atau tidak hal itu justru akan memberikan dampak psikologis bagi anak yaitu tidak adanya rasa percaya diri anak dan anak akan tertinggal dan

tidak mampu menyesuaikan kemampuannya dengan kemampuan siswa yang lulus dengan hasil seleksi yang benar. Dalam kasus yang demikian diperlukan pemahaman dan dukungan orang tua terhadap anak yang tidak lulus bahwa masih banyak kesempatan belajar di tempat lain dan tidak harus di sekolah favorit. Selain itu, pengawasan terhadap kemungkinan-kemungkinan munculnya pungli pun terutama pada penerimaan siswa baru perlu diperketat.

Penggunaan Kata Berlawanan (Antonim)

Penggunaan kata berlawanan yang paling mencolok dalam berita pungli di sekolah ini adalah daring (*online*) dan luring (*offline*). Kata yang berlawanan ini juga disebut dengan istilah oposisi (*oppositeness*) yang bermakna kebalikan atau berlawanan. Kata daring (*online*) dan luring (*offline*) ini dapat kita lihat pada kutipan berikut.

“Berdasarkan surat dakwaan jaksa, terdakwa selaku Kepala Sekolah melakukan penambahan bangku tidak melalui mekanisme pendaftaran yang seharusnya berlaku yakni pendaftaran secara *online*. Sekolah juga memanipulasi data laporan pendaftar siswa sehingga ada perbedaan yang masuk.” (online24jam.com/1 Agustus 2017)

“Saat melaporkan kasus tersebut, Sukardi membawa dokumen daftar siswa yang tidak lulus, namun diluluskan melalui jalur *offline* dan daftar 42 penyumbang mulai Rp 200.000 hingga Rp 2,5 juta dengan jumlah total sekitar Rp 27 juta.” (berita-satu.com/6 Maret 2017)

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa kata daring (*online*) merupakan jalur yang benar terkait dengan jalur penerimaan siswa baru, selain dua jalur lainnya, yaitu jalur domisili, dan jalur inklusi. Sedangkan luring (*offline*) adalah jalur yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan atau jalur yang tidak dibenarkan. Jalur luring (*offline*) inilah yang membuka peluang bagi sekolah melakukan penerimaan siswa baru secara tertutup dan melakukan pungutan liar bagi siswa baru tersebut dengan alasan penambahan kelas. Padahal, secara logika, jika penerimaan siswa baru di sekolah diterapkan secara *online*, untuk apa dibuka jalur *offline*. Menilik kasus penerimaan siswa baru jalur *offline*, pihak sekolah tentu saja tidak serta merta membuka jalur ini begitu saja. Tetapi, tentu punya dasar untuk melakukan itu. Hal ini pun terungkap dalam kutipan berikut.

“Anggota Komisi D DPRD Makassar Andi Nurman menyebut pungutan liar (pungli) yang banyak terjadi di dunia pendidikan utamanya sekolah, disebabkan adanya aturan terkait penambahan kelas. Aturan penambahan itu sendiri diterbitkan langsung melalui Surat Keputusan (SK) walikota mengenai penambahan kelas untuk mengakomodasi siswa-siswa berprestasi.” ([Pojoksulsel.com/14](http://pojoksulsel.com/14) Maret 2017)

Berdasarkan kutipan di atas diketahui bahwa dasar dibukanya jalur *offline* ini adalah SK Walikota Danny Pomanto yang memberi kewenangan kepala sekolah untuk melakukan penambahan kelas dalam mengakomodasi siswa-siswa yang berprestasi. Hanya saja, faktanya, bukan siswa yang berprestasi yang diterima tetapi siswa yang mampu (kaya) dan bersedia membayar atau memberikan sumbangan untuk penambahan kelas. Hal ini menandakan bahwa ada ideology kekuasaan yaitu pemerintah dalam kasus jalur *offline* ini. Pihak pemerintah tentu lebih paham bahwa jika penerimaan siswa baru dilakukan secara *online*, itu artinya tidak diperlukan lagi secara *offline*. Akan tetapi, ketika kasus ini mencuat kepermukaan, pihak pemerintah seakan memungkiri kebijakan yang telah dikeluarkannya. Hal ini pada akhirnya menggiring kepala sekolah sebagai pelaku tunggal dalam kasus pungli ini. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Sejak saya jadi walikota, saya sudah menekankan kepada semua aparat maupun pegawai untuk tidak main-main dengan praktik pungutan liar karena ada sanksi dari saya yang terbukti.” Ujarnya di Makassar, Sabtu (22), demikian dilansir Antara. (Merdeka.com/23 Oktober 2017)

Dari kutipan tersebut diketahui bahwa walikota menentang perilaku pungli di sekolah. Tetapi di satu sisi, beliau tidak mengeluarkan aturan atau sanksi tegas kepada pelaku pungli di sekolah. Padahal, kasus pungli ini bukanlah hal baru, tetapi sudah terorganisir. Kasus ini baru mencuat ke permukaan, setelah peralihan Sekolah Menengah Atas ke provinsi.

Hal lain yang juga mendukung terjadinya pungli di sekolah dengan modus penambahan kelas karena tidak adanya standar jumlah siswa setiap kelas sehingga menjadi peluang bagi kepala sekolah atau guru memasukkan siswa baru lewat jendela atau jalur pintas. Oleh karena itu, pemerintah perlu memikirkan standarisasi siswa setiap kelas, dan aturan baku penerimaan siswa baru serta pengawasan dan pemantauan segala aktivitas yang berlangsung di sekolah.

Penafsiran Praktik Wacana

Penafsiran terhadap wacana “pungli di sekolah” ini berkaitan dengan cara-cara penulis memproduksi teks. Melihat judul yang ditampilkan oleh penulis dari berbagai media khususnya media online, dapat dikatakan bahwa dalam memproduksi teks, sebagian besar penulis menggunakan strategi wacana nominasi dengan menyebut actor sosialnya. Hal ini terlihat pada kutipan judul berikut ini.

“Kepala SMAN 1 Tersangka Pungli” (beritakotamakassar.fajar.co.id/1 Maret 2017)

“Kepseknya Tertangkap Pungli, Ini Imbauan Dinas Pendidikan Bulukumba” (Rakyatku.com/1 Maret 2017)

“DUGAAN PUNGLI PENERIMAAN SISWA BARU: Kepsek SMAN 1 Makassar Dijebloskan ke Penjara” (Kabar24.bisnis.com/27 April 2017)

Berdasar kutipan judul di atas, dapat dikatakan bahwa penulis menggunakan strategi wacana nominasi yaitu suatu strategi wacana yang menampilkan aktor dalam pemberitaan dengan apa adanya. Pada berita “Kepala SMAN 1 Tersangka Pungli” (beritakotamakassar.fajar.co.id/1 Maret 2017) menampilkan Kepala SMAN 1 yaitu Abdul Hajar sebagai actor atau pelaku pungli yang telah menjadi tersangka. Begitu pula pada berita “Kepseknya Tertangkap Pungli, Ini Imbauan Dinas Pendidikan Bulukumba” (Rakyatku.com/1 Maret 2017). Meskipun tidak menyebut nama, tetapi khalayak dapat mengetahuinya dengan menyebutkan identitas pelaku punglinya yaitu Kepala SDN 98 Bontomanai. Hal yang sama pada berita “DUGAAN PUNGLI PENERIMAAN SISWA BARU: Kepsek SMAN 1 Makassar Dijebloskan ke Penjara” (Kabar24.bisnis.com/27 April 2017), juga menampilkan Kepala SMAN 1 yaitu Abdul Hajar sebagai aktor atau pelaku pungli yang telah menjadi tersangka. Pada judul berita ini, penulis menampilkan tulisan DUGAAN PUNGLI PENERIMAAN SISWA BARU: dengan huruf capital dengan tulisan yang cukup besar, sedangkan tulisan Kepsek SMAN 1 Makassar Dijebloskan ke Penjara ditampilkan dengan huruf yang kecil kecuali pada awal kata kata dan singkatan nama sekolah. Dalam hal ini, sepertinya penulis ingin memancing rasa yang dapat ditimbulkan pembaca setelah membaca berita tersebut. Selain itu juga ingin memperjelas kasus yang menjerat Kepsek SMAN 1 Makassar tersebut.

Terhadap keseluruhan berita yang ditampilkan apa adanya tersebut, dapat diketahui bahwa pada dasarnya penulis mendukung pemberantasan terhadap Pungli di sekolah. Hal ini terlihat dari tulisan yang memberikan informasi secara jelas, detil sesuai dengan kebenaran yang ada, tanpa berusaha menyembunyikan atau menyamarkan berita terutama pelaku pungli.

Penjelasan Praktik Sosiokultural

Penjelasan tentang praktik sosiokultural meliputi tiga tingkatan, yaitu: 1) tingkatan situasional, yang berkaitan dengan produksi dan konteks situasinya; 2) tingkatan institusional, berkaitan dengan pengaruh institusi secara internal dan eksternal; dan 3) tingkatan sosial,

yang berkaitan dengan situasi makro seperti system politik, system ekonomi, dan system budaya masyarakat secara keseluruhan.

a) Tingkatan Situasional

Pungutan liar yang terjadi di sekolah disebabkan adanya peluang, sikap pembiaran dan lemahnya pengawasan. Terkait dengan kasus pungli di SMA Makassar, itu terjadi karena adanya kebijakan dari pemerintah sebagai pemangku kekuasaan (Walikota) yang menerbitkan SK tentang penambahan kelas bagi siswa yang berprestasi. Hal ini membuat sebagian kepala sekolah berinisiatif untuk membuka jalur *offline*. Jalur *offline* ini pun terus berjalan karena adanya sikap pembiaran dari pemangku wewenang. Hal ini juga dikarenakan adanya jatah calon siswa bagi pihak pemangku kekuasaan seperti pejabat pemerintahan. Faktor lainnya adalah kurangnya pengawasan sehingga pelaku pungli semakin berani menjalankan aksinya. Padahal, mereka tahu bahwa pungli itu adalah salah satu tindakan pidana korupsi yang memiliki sanksi pidana. Hal ini terjadi karena kurangnya nilai-nilai moral yang terintegrasi menjadi kepribadian yang kokoh dalam diri pemangku kekuasaan. Akhirnya, demi sebuah nominal, moral tergadai. Akibatnya, sistem pendidikan kita pun menjadi bobrok.

b) Tingkatan Institusional

Dalam tingkat institusional, pungutan liar di sekolah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dalam hal ini adalah budaya korupsi (pungli) yang berkembang dalam institusi yang dalam hal ini adalah sekolah. Kasus pungli yang terjadi selama ini karena adanya semacam warisan turun temurun yang berlaku dan seakan menjadi sebuah pembenaran di institusi (sekolah) itu, terutama sekolah-sekolah favorit. Dalam perkembangannya, kasus pungutan liar di sekolah ini telah menjadi budaya dan terorganisir dengan baik yang melibatkan pihak luar seperti makelar yang memiliki koneksi atau kedekatan dengan pemegang kekuasaan yang dalam hal ini adalah kepala sekolah, pejabat pemerintah (walikota, kepala dinas pendidikan), dan anggota legislatif. Faktor eksternal dalam hal ini adalah adanya desakan atau paksaan dari pihak luar seperti orang tua yang berkeinginan anaknya bersekolah di sekolah unggulan atau favorit dan adanya titipan atau jatah pejabat pemerintah atau anggota legislatif yang mengharuskan pihak sekolah untuk menerimanya dengan membukakan jalur khusus seperti *offline* 'luar jaringan'. Namun, ketika dihadapkan pada sebuah pertanggung jawaban, semua lepas tangan seakan tidak terlibat dan tidak tahu menahu dengan kasus pungli yang terjadi di sekolah tersebut.

c) Tingkatan Sosial

Pungutan liar (pungli) termasuk dalam kategori kejahatan jabatan. Konsepnya yaitu menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Dalam istilah lainnya adalah uang sogokan, uang pelican, salam temple, dan lain-lain.

Selain penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, munculnya pungli ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi yaitu kurangnya kesejahteraan. Penghasilan tidak mencukupi kebutuhan hidup dan tidak sebanding dengan tugas atau jabatan yang diemban. Beberapa tahun ini kesejahteraan guru mulai diperhatikan dengan memberikan tunjangan profesi (sertifikasi). Akan tetapi tidak berkesinambungan atau dibayarkan triwulan atau per semester sehingga sebagian guru tidak menikmatinya dan masih merasa kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Selain itu, pungutan liar dipicu oleh keinginan untuk meningkatkan kelas sosial sebagai sebuah prestise atas jabatan yang diemban.

Selain faktor ekonomi, pungutan liar yang terjadi di sekolah akhir-akhir ini terutama yang terjadi di Makassar juga dipengaruhi oleh unsur politik. Seperti yang diketahui bersama bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dulu berada dalam naungan Kota Makassar atau Dinas Pendidikan Kota Makassar yang kebijakannya berada dalam kekuasaan Dany

Pomanto, sekarang diambil alih oleh provinsi yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang sekarang dipimpin oleh Irman Yasin Limpo yang disapa None. Kedua tokoh ini masing-masing memegang peranan politik di Makassar. Dany Pomanto adalah Walikota Makassar dan kembali akan mencalonkan diri pada pemilihan walikota Makassar tahun depan, Begitu pun dengan None yang akan mencalonkan diri sebagai Walikota Makassar tahun depan. Ketika SMA diambil alih oleh provinsi, kasus pungli mulai mencuat dan menyorot kebijakan pemerintah sebelumnya yang dalam hal ini adalah kebijakan Kota Makassar. Sementara dari pihak provinsi terus memperlihatkan kinerja positifnya dengan membongkar kasus-kasus pungli di beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA). Secara tidak langsung, hal ini bertujuan mengambil simpati masyarakat terutama dalam memberantas korupsi dan Saber Pungli.

KESIMPULAN

Berdasarkan AWK model Norman Fairclough, dapat disimpulkan bahwa dalam berita korupsi tentang pungli di sekolah, terdiri atas tiga dimensi, yaitu: 1) dimensi linguistik teks, yang menampilkan beberapa aspek linguistik sebagai konsep dalam menjelaskan sebuah konteks, yaitu: a) penggunaan akronim, b) penggunaan idiom, dan c) penggunaan lawan kata; 2) dimensi penafsiran praktik wacana, yang mengungkapkan bahwa dalam memproduksi teks berita tentang pungli di sekolah, media rata-rata menggunakan strategi wacana nominasi dengan penyebutan aktor sosial, melalui prinsip kejelasan, kebenaran dan kesesuaian; 3) dimensi penjelasan sosio kultural yang terdiri atas: a) Tingkatan Situasional, menjelaskan bahwa pungutan liar yang terjadi di sekolah disebabkan adanya peluang, sikap pembiaran, lemahnya pengawasan, dan kurangnya nilai-nilai moral yang terintegrasi dalam kepribadian pemangku jabatan; b) Tingkatan Institusional, menjelaskan bahwa pungutan liar yang terjadi di sekolah disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal dalam hal ini adalah budaya korupsi (pungli) yang berkembang dalam institusi yang dalam hal ini adalah sekolah. Faktor eksternal dalam hal ini adalah adanya desakan atau paksaan dari pihak luar seperti orang tua yang berkeinginan anaknya bersekolah di sekolah unggulan atau favorit dan adanya titipan atau jatah pejabat pemerintah atau anggota legislatif yang mengharuskan pihak sekolah untuk menerimanya dengan membukakan jalur khusus seperti *offline* ‘luar jaringan’; c) Tingkatan Sosial, yang menjelaskan bahwa pungutan liar (pungli) termasuk dalam kategori kejahatan jabatan. Konsepnya yaitu menyalahgunakan kekuasaan. Selain itu juga dipicu oleh faktor ekonomi yaitu kurangnya kesejahteraan dan faktor politik dalam masa transisi peralihan SMA dari Kota Makassar ke Provinsi.

Referensi

- Darma, Yoce Aliah. 2014. *Analisis Wacana Kritis dalam Multiperspektif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Djatmika. 2014. *Pernik Kajian Wacana*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prayogi dan Rusminto. 2016. *Wacana Berita Bertajuk Korupsi dalam Situs Indonesiana dan Implikasi Pembelajaran Analisis Wacana*. [Http:// download.portalgaruda.org](http://download.portalgaruda.org). Diakses pada tanggal 14 Mei 2023.
- Rasyid, Armia. 2009. *Nilai Relasional Model Kalimat dalam Wacana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2008—2013 (Analisis Wacana Kritis)*. Makassar: Dalam Jurnal *Sawerigading*, Volume 15 Nomor 2, Agustus 2009. Balai Bahasa Ujung Pandang, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Syamsuddin, A.R. 1992. *Studi Wacana Teori Analisis-Pengajaran*. Bandung: FPBS Press.
- Titscher, Stefan, dkk. 2000. *Motode Analisis Teks dan Wacana (Terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Vinsensius. 2007. *Norman Fairclough*. Majalah Kajian Media Online. [Http://dictum4magz.wordpress.com/2007/12/04/norman-fairclough](http://dictum4magz.wordpress.com/2007/12/04/norman-fairclough). Diakses tanggal 14 Mei 2023.